

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH DAN
BUDAYA ORGANISASI DAERAH TERHADAP
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi)**

JURNAL



TONI SYAMSIR

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH DAN BUDAYA ORGANISASI DAERAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi)

TONI SYAMSIR

2008/05307

**Artikel ini di susun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Juni 2014
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.**

Padang, Mei 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Efrizal Syofyan, Se, M.Si, CA, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001**

Pembimbing II



**Nurzi Sebrina. SE. Msc. Ak
NIP.19720910 199802 2 003**

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAN BUDAYA ORGANISASI DAERAH
TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi)**

Toni Syamsir

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar. Padang
Email: Tony_see@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran inspektorat daerah dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD kota Bukittinggi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *total sampling*, dan diperoleh 32 sampel di seluruh SKPD. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) peran inspektorat daerah tidak berpengaruh dan negatif terhadap penerapan *good governance*, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0,439 < 2,0017$ (sig 0,663 > 0,05) yang berarti H_1 ditolak. 2) budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,852 > 2,20017$ (sig 0,000 < 0,05) yang berarti H_2 diterima.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) pemerintah menetapkan indikator kinerja agar kinerja pemerintah lebih mudah untuk diukur oleh auditor dan penerapan *good governance* dapat tercapai, (2) peningkatan peran budaya organisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat dan (3) penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Kata kunci: Peran auditor internal (Inspektorat Daerah), budaya organisasi, *good governance*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of regional inspectorate role and organizational culture on the implementation of good governance at the regional work units (SKPD) Bukittinggi City .

This study classified the causative research . The population in this study were all SKPDs town of Bukittinggi . Sampling was done with a total sampling method , and obtained 32 samples throughout SKPDs . The type of data used is the data subject and the data source used is primary data . Data collection method used is to use a questionnaire . The analysis used is multiple regression analysis.

The results show that : 1) the role of regional inspectorate and not adversely affect the implementation of good governance , where $t_{count} > t_{table}$ is $-0.439 < 2.0017$ (sig 0.663 > 0.05) , which means that H_1 is rejected . 2) a significant positive influence of organizational culture on the implementation of good governance , where $t_{count} > t_{table}$ is $4.852 > 2.20017$ (sig 0.000 < 0.05) which means that H_2 is accepted .

In this study suggested : (1) the government sets performance indicators so that it is easier to government performance is measured by the auditors and the implementation of good governance can be achieved , (2) increasing the role of organizational culture in can on society and (3) the research could further adding variables another influence on the implementation of good governance .

Keywords: The role of internal auditors (Regional Inspectorate), organizational culture, good governance

1. Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang sebelum berlakunya UU No.32 tahun 2004 berubah menjadi daerah yang memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kedua, sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab pula.

Menurut Dharma (2004) pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang menerapkan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi,

responsivitas, orientasi konsensus keadilan, efektifitas dan efisien akuntabilitas, visi strategi dan salih keterkaitan.

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang universal, karena itu seharusnya di tetapkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mardiasmo (2002) menyatakan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga unsur tersebut tentunya memiliki fungsi dan implikasi yang berbeda pula.

Tajuddin dalam Kiki Wardani (2008) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *good governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, peralatan daerah serta faktor organisasi dan manajemen.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua pemerintah daerah

sehubungan dengan pelaksanaan *good governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *good governance* di dalam pemerintah daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta program pendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Good governance akan tercapai jika lembaga pengawas dan pemeriksa (audit internal) berfungsi secara baik (Mardiasmo:2002). Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diakomodasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah. Inspektorat daerah merupakan audit internal yang mana aktivitasnya berupa memberikan konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional organisasi.

Perubahan paradigma telah terjadi dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) yang kemudian

disusun dengan lahirnya PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilanjutkan dengan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibantu oleh Inspektorat Jendral Depdagri dan Inspektorat Daerah mulai tahun 2006 telah memeriksa penggunaan semua APBD di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Inspektorat pengawas daerah memiliki peran untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar, di luar tugas-tugas awal inspektorat daerah sebelumnya sebagai aparat pengawas. Peranan dari inspektorat daerah diantaranya untuk membantu kepala daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum dan peran audit internal memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah yang mana itu merupakan salah satu bagian untuk tercapainya penerapan *good governance* pada pemerintah daerah.

Audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah tersebut membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi pemerintah daerah. *Good governance* akan tercapai jika peran dari inspektorat daerah (auditor internal) berjalan secara baik.

Budaya organisasi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna pada institusi pemerintah daerah serta menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai aturan atau pedoman

berprilaku di dalam organisasi pemerintahan daerah (Edy:2010). Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *good governance*. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*). *Good governance* akan memberikan birokrasi yang memiliki keyakinan dan nilai sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Budaya organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Agus Suryono:2013). Dimana dengan penerapan *good governance* diperlukan aparat pemerintah yang memiliki keyakinan dan nilai dalam bertindak, mengungkap perasaan dan berfikir.

Menurut Agus Dwiyanto (2005) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan suatu birokrasi pemerintah yaitu budaya organisasi. Dan menurut Agus Suryono (2013) pelayanan kepada publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangat kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.

Budaya organisasi pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu budaya organisasi pemerintah daerah diupayakan untuk berjalan sesuai keyakinan dan nilai yang terkandung didalam budaya organisasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan yang baik dan memiliki budaya organisasi sesuai dengan yang

diharapkan oleh masyarakat dapat dilihat dari keyakinan dan nilai yang dimiliki oleh aparaturnya. Fakta dilapangan menunjukkan pelayanan birokrasi yang masih jauh dari harapan masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan dari aparat pemerintah seringkali harus disertai dengan “ucapan terima kasih” oleh masyarakat agar dapat mendapatkan pelayanan yang cepat. Birokrasi yang demikian bukan saja menghambat tujuan reformasi tetapi juga telah menjadi sarang korupsi oleh aparat pemerintah daerah. Efektifitas pelayanan aparat pemerintah pada umumnya masih sangat rendah, ini dapat dirasakan dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian dari kebutuhan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kota Bukittinggi untuk laporan keuangan tahun 2012. Yang mana terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp70 M. Pemerintah menjelaskan penyebab utama perencanaan kurang matang dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan konsep *value for money* yang merupakan dasar dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh para pimpinan dan perencana SKPD sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif dan anggaran tidak dapat diserap secara optimal. (*Singgalang, 30 September 2013*).

Walaupun pada saat ini pemerintahan telah menerapkan *good governance* pada pemerintahan daerah, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terdapat dalam tubuh pemerintah daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tingkat tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini peneliti beri

judul **Pengaruh Inspektorat Daerah Dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*.**

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Good Governance

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut : “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dalam Mardiasmo (2002:24) *UNDP* memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi :

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

2. Aturan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia secara mutlak, terutama kelompok minoritas. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan

yang independen dan pihak penegak hukum yang tidak korupsi.

3. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses oleh mereka yang membutukannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap pelaksanaan pemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholdernya secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap kemauan masyarakat).

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi anatara pemerintah msyarakat dan sektor swasta, pemerintah sebagai penegak bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintahan, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).

Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal ataupun eksternal.

9. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human developmen*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan sosial yang mendasari perspektif mereka.

Inspektorat Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Audit internal memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas organisasi. Aktivitas audit internal dilakukan dalam kondisi hukum dan budaya yang beragam, dalam organisasi-organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran maupun struktur dan oleh orang di dalam ataupun di luar organisasi.

Abdul (2002) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada suatu lembaga atau instansi sangat tergantung pada jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, ada baiknya bila dipahami pula perbedaan antara pemeriksaan keuangan secara internal maupun secara eksternal. Pemeriksaan keuangan secara internal, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam lingkungan pemerintah secara keseluruhan atau inspektorat wilayah (itwil) dalam lingkungan pemerintah daerah adalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Presiden atau Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur dan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Bupati/Walikota 2 (dua) minggu sebelum dan/atau sesudah berakhirnya masa bakti .
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atas adanya surat pengaduan masyarakat, perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja.
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pemerintah desa.

Fungsi dari auditor internal (inspektorat) yang berjalan dengan baik akan menghasilkan pengeluaran yang berharga yang akan menjadi masukan bagi pihak eksternal, seperti auditor ekstern, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu pelaporan. Oleh karena itu fungsi dari auditor internal (inspektorat) perlu diberdayakan demi tercapainya tujuan dari penerapan sistem

pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, ekonomi, efektif, efisien dan berkeadilan.

Budaya Organisasi Terhadap *Good Governance*

Budaya organisasi menurut Robbin (2001) ialah suatu persepsi bersama yang dianut oleh organisasi itu sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan makna bersama di antara pada anggotanya. Jadi di dalam budaya organisasi terkandung bauran nilai-nilai kepercayaan, asumsi, persepsi, norma kekhasan dan pola perilaku anggota organisasi dalam suatu organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungan tersebut.

Menurut Robins dalam Edy (2010), ada sepuluh karakteristik kunci yang merupakan inti dari budaya organisasi, yaitu:

- a) *Member identity*
Identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan, dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing.
- b) *Group emphasis*
Seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan dibandingkan kerja individual.
- c) *People focus*
Seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil untuk mempertimbangkan keputusan tersebut terhadap anggota organisasi.
- d) *Unit integration*
Seberapa jauh unit-unit didalam organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara bersama-sama.
- e) *Control*
Seberapa banyak aturan, peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan.
- f) *Risk tolerance*
Besarnya dorongan terhadap karyawan untuk lebih agresif, inofatif dan mengambil resiko.
- g) *Reward criteria*

Seberapa besar anggaran dialokasikan sesuai dengan kinerja karyawan dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas atau faktor bukan kinerja lainnya.

- h) *Conflict tolerance*
Seberapa besar karyawan di dorong untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan kritik.
- i) *Means-ends orientation*
Seberapa besar manajemen lebih menekankan pada penyebab atau hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil.
- j) *Open-sistem focus*
Seberapa besar pengawasan organisasi dan respons yang diberikan untuk mengubah lingkungan eksternal.

Budaya organisasi yang kuat dan luas akan meningkatkan keberhasilan kinerja suatu organisasi pemerintah. Apabila budaya organisasi suatu instansi pemerintah lemah pasti membuat pelayanan terhadap masyarakat akan sulit tercapai. Jadi antara budaya organisasi dengan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat pengaruh yang signifikan (positif) yaitu semakin baik budaya organisasi maka akan semakin baik pula pelayanan pemerintah (*good governance*) kepada masyarakat. Dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini yang mana pengaruh budaya organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

Penelitian Relevann

Kurnia (2009) tentang pengaruh sistem pengendalian intern, peran auditor internal dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 48

instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan strata (proporsional sampling). Dan juga mengenai penelitian yang dilakukan oleh Habibie mengenai pengaruh pengawasan DPRD, Pengendalian internal dan peran auditor internal terhadap penerapan *good governance* pada Pemerintahan Kota Solok. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil peran auditor internal berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Solok yang berjumlah 25 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel keseluruhan (total sampling).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andini (2007) tentang konsep dan Implikasi *Good Governance* pada forum zakat, disini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* salah satunya yaitu budaya organisasi. Dimana ditemukan bahwa secara simultan dan parsial budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan Handi pada SKPD Kota Padang, dimana dia melakukan penelitian pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil pengaruh budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 42 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel keseluruhan (total sampling).

Kerangka Konseptual

Good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan

penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil serta relatif merata. Negara yang telah berhasil menerapkan *good governance* yaitu negara yang bersih dari KKN.

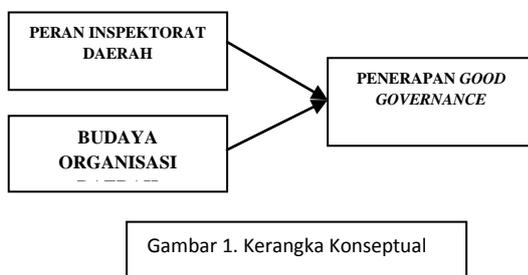
Peran inspektorat daerah sangat penting dalam terciptanya *good governance* yang banyak di impikan oleh banyak masyarakat. Inspektorat daerah mempunyai peranan sebagai pengontrol dalam operasi organisasi pemerintah. *Good governance* akan terlaksana jika peran auditor internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah berfungsi secara baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat daerah (auditor internal) berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah.

Sebagai makhluk sosial, anggota tidak lepas dari berbagai nilai dan norma yang berlaku di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara anggota dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan anggota lain. Dalam setiap organisasi, budaya organisasi selalu diharapkan baik karena baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang positif akan memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif akan memberi dampak yang negatif bagi organisasi. Oleh sebab itu, apabila budaya organisasinya baik maka kinerja yang akan dicapai pasti juga akan baik dan penerapan *good governance* dapat tercapai.

Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Dengan kata lain, apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik, dengan demikian di harapkan tata pemerintahan yang efektif, partisipatif,

transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum (*good governance*) dapat tercapai.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat dan untuk mencapai itu tentunya diperlukan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercipta dengan peran inspektorat daerah dan budaya organisasi yang baik pula. Berdasarkan uraian di atas untuk lebih jelasnya kaitan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H₁: Peran inspektorat daerah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*.
- H₂: Budaya organisasi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian dan permasalahan, maka jenis penelitian ini ialah penelitian kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2008:37).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bukittinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkot Kota Bukittinggi jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 32 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Untuk sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling* dimana seluruh SKPD yang terdapat di Kota Bukittinggi dijadikan sampel. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan di masing-masing SKPD.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dimana subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan masing-masing SKPD di Kota Bukittinggi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan SKPD di Kota Bukittinggi dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode survey. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (*respon rate*) adalah dengan cara mengantar langsung kuesioner tersebut dan juga menghubungi kembali responden melalui telepon guna memastikan bahwa kuesioner yang diantar telah diisi oleh responden, setelah itu dikumpulkan kembali dengan menjemputnya langsung.

Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependent

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah *good governance* (Y).

Variabel independent

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah peran inspektorat daerah (X_1) dan budaya organisasi daerah (X_2).

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai peran inspektorat daerah dan budaya organisasi daerah terhadap penerapan *good governance* di SKPD pemerintahan Kota Bukittinggi. Pengisian angket ini dilakukan oleh kepala dinas dan kepala bagian keuangan di SKPD pemerintah Kota Bukittinggi

Uji validitas dan Reliabilitas

Sebelum instrumen ini digunakan dalam pengambilan data penelitian, terlebih dahulu dilakukan *pilot test*. *Pilot test* ini dilakukan terhadap 30 orang mahasiswa akuntansi FE UNP program studi akuntansi yang memiliki konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Untuk melihat validitas dari masing-masing item instrumen kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*.

Hasil Uji Valid

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=30$ adalah 0.3061.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, jika

nilai signifikan yang dihasilkan > 0.05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Jika tidak terjadi korelasi dari variabel-variabel bebas maka tidak terdapat masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* \leq (VIF) 10 dan *tolerance* $\geq 0,10$.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan *uji glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedistitas.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan langkah-langkah berikut:

1. Analisis deskriptif

Untuk mempelajari tata cara penghitungan, penyusunan, penyajian, dan analisis data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari sebuah data

2. Metode Analisis

a. Uji F

Digunakan untuk mengetahui apakah suatu model dapat memprediksi dengan baik atau tidak.

b. Koefisien Determinan (*R square*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas.

b. Koefisien Regresi

Analisis data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji Hipotesis (uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dari variabel yang di gunakan dalam penelitian ini maka disini penulis perlu membuat suatu batasan atau definisi dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. *Good Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka memediasi perbedaan-perbedaan serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. Dalam penelitian ini pengukuran *good governance* dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang teguh pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efisiensi dan efektif, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya orientasi pada nilai-nilai.
2. Inspektorat daerah merupakan media yang memberikan konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional organisasi. Audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah tersebut membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan

efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi pemerintah daerah. Inspektorat digunakan dalam rangka menentukan dan mengawasi jalannya pengendalian intern dalam suatu organisasi, supaya dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, adil, dan bersih.

3. Budaya organisasi daerah merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi. Budaya organisasi memberikan ketegasan dan mencerminkan spesifikasi suatu organisasi. Budaya organisasi melingkupi seluruh pola perilaku anggota organisasi dan menjadi pegangan bagi setiap individu dalam berinteraksi, baik di dalam ruang lingkup internal maupun ketika berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini pengukuran budaya organisasi yaitu berdasarkan indikator-indikator kebersamaan, peran pemimpin dan integritas.

4. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *corrected item-total colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=50$ adalah 0,279.

Berdasarkan hasil pengolahan data di dapat nilai *Correct item-Total Correlation* untuk masing-masing variabel X_1, X_2 dan Y tidak semua diatas r_{Tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan X_1, X_2 dan Y adalah tidak valid. Untuk item pernyataan Y yang tidak valid terdapat pada pernyataan nomor 1,12 dan 13 dan untuk pernyataan X_2 yang pernyataan tidak valid terdapat pada item pernyataan nomor 2. Untuk pernyataan yang tidak valid dalam pengolahan data selanjutnya dihilangkan. Pada Tabel 17

terlihat nilai *Correct item-Total Correlation* terkecil untuk variabel X_1 dan X_2 adalah 0,300 dan untuk variabel Y adalah 0,331.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabel instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reliabilitasnya dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6 menurut Ghazali (2006:42).

Dari hasil nilai *Cronbach's Alpha* terdapat nilai untuk instrumen peran inspektorat daerah adalah 0,672, pengaruh budaya organisasi adalah 0,751 dan *good governance* adalah 0,793 ini menunjukkan nilai berada diatas 0,6. Dengan demikian semua instrumen dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov test*, yang mana jika nilai *asympt.sig (2-tailed)* > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Dari hasil olahan data terlihat bahwa nilai *asympt.sig (2-tailed)* berada diatas 0,05 yaitu 0,834. Dengan demikian data dapat dikatakan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0,1. Variabel peran inspektorat daerah (X_1) dengan nilai VIF 1.120, variabel budaya organisasi daerah (X_2) dengan nilai VIF 1.120 . pada variabel peran inspektorat daerah (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,893, variabel budaya organisasi daerah (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,893. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari *residual* atas satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *uji glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan olahan data dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel > 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Analisis Data

1. Uji F

Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{Tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ dan nilai $\text{sig} > \alpha$ 0,05. Nilai F_{Tabel} pada α 0,05 adalah 2,012. Nilai F_{hitung} adalah 12,508 sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian $F_{\text{hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ dan nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 yaitu $12,508 > 2,012$ dan $\text{sig} 0,000 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Pengaruh peran inspektorat daerah dan budaya organisasi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

2. Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,320. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Daerah terhadap variabel terikat yaitu penerapan *Good Governance* 32,00%

sedangkan 58,9% ditentukan oleh faktor lain.

3. Persamaan Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil olahan data dapat menghasilkan model analisis sebagai berikut:

$$Y = 24,340 - 0,067 X_1 + 0,577 X_2 + e$$

Dimana :

- a = Konstansta
- X_1 = Peran inspektorat daerah
- X_2 = Pengaruh budaya organisasi
- Y = Penerapan *good governance*

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 24,340 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu peran inspektorat daerah dan budaya organisasi daerah adalah nol maka nilai penerapan *good governance* (24,340).
- b. Koefisien peran inspektorat daerah sebesar -0,067 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan peran inspektorat daerah satu satuan akan mengakibatkan penurunan penerapan *good governance* sebesar 0,067 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif 0,067.
- c. Koefisien budaya organisasi daerah sebesar 0,577 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan peran budaya organisasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan penerapan *good governance* sebesar 0,577 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,577.

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05.

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,0017. Untuk variabel peran inspektorat daerah (X_1) nilai t_{hitung} adalah -0,439 dan nilai sig adalah 0,663. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $-0,439 < 2,0017$ atau nilai signifikansi $0,663 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu 0,067. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan peran inspektorat daerah (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,20017. Nilai t_{hitung} untuk variabel peran budaya organisasi daerah (X_2) adalah 4,852 dan nilai sig 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,852 > 2,20017$) dan nilai signifikan $0,000 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,557. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan peran budaya organisasi daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran inspektorat daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance* dengan nilai $t = -0,439$ dan nilai signifikan 0,663. Semakin baik peran inspektorat daerah maka akan tidak akan tercapai penerapan *good governance*.

Hubungan negatif antara inspektorat daerah dengan penerapan *good governance* menurut Mardiasmo (192:192) dapat terjadi karna terdapat dua kelemahan dalam melakukan audit oleh inspektorat di Indonesia. Kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan yang pertama bersifat *inherent* dan yang kedua lebih bersifat struktural.

Kelemahan yang pertama yaitu tidak tersedianya indikator kinerja (*performance indikator*) yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dan kelemahan yang kedua yaitu terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksa pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang *overlapping* satu dengan yang lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif.

Jika dilihat dari kaca mata akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga permasalahan dalam penerapan *good governance* yang masih jauh dari kenyataan. Pertama, belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan yang handal. Kedua, sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan yang ketiga yaitu belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Menurut Mardiasmo tersebut juga ditemukan dilapangan, yang mana terbatasnya latar belakang pendidikan akuntansi personel pemerintah daerah yang ditemukan kebanyakan personel pemerintah daerah pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan.

2. Pengaruh Peran Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Semakin baik budaya organisasi daerah maka akan sebaik juga penerapan *good governance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Suryono (2009:67) yang mana pelayanan kepada publik sebagai suatu proses kinerja organisasi (birokrasi), keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangat kuat dan juga menurut Dwiyanto (2005:24) yang mana salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan suatu birokrasi pemerintah yaitu budaya organisasi.

Budaya organisasi pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu budaya organisasi pemerintah daerah diupayakan untuk berjalan sesuai keyakinan dan nilai yang terkandung didalam budaya organisasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel peran budaya organisasi yang mana terdapat pada pernyataan nomor 5 bahwasanya terdapatnya peraturan dan pengawasan langsung dalam mengawasi kinerja aparat ini menunjukkan jika peraturan dan pengawasan langsung dapat meningkatkan peran budaya organisasi dalam bertindak serta total TCR yang mencapai 79,16% dengan kategori baik.

Jika dikaitkan dengan penerapan *good governance* pengaruh budaya organisasi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karna peraturan dan pengawasan langsung dapat memberikan hasil yang optimal

pada masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*. Dimana semakin baik budaya organisasi daerah, semakin baik pula penerapan *good governance*. *Good governance* dalam budaya organisasi merupakan tuntutan dari otonomi daerah yang mana masyarakat di era reformasi saat sekarang ini meminta pelayanan yang transparan dan responsif.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Peran dari inspektorat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* pada instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.
2. Peran budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance* pada instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 58,9% sedangkan 35,73% dijelaskan oleh faktor yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penerapan *good governance*.
2. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan koesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara ataupun tanya jawab langsung pada responden.

Sebaiknya dalam mengumpulkan data juga dilengkapi dengan pertanyaan langsung atau wawancara pada responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja inspektorat daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana untuk itu menentukan indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah dan memperbaiki lembaga pemeriksa pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan pengauditan berjalan secara efektif dan efisien.
2. Untuk pada tiap-tiap SKPD diharapkan untuk meningkatkan peran budaya organisasi dalam melayani masyarakat, agar pelayanan yang optimal dapat tercapai dan tujuan dari *good governance* akan dapat tercapai.
3. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan *good governance*, seperti: implementasi *financial audit*, *value for money* audit, kinerja aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi. Pengertian, Makna dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Organisasi*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Ahmad Syahroza. 2007. *Tantangan Independensi Dalam Organisasi Pemeriksaan*. (www.google.com) (Diakses 8 Maret 2013).
- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Agus Suryono. *Budaya Birokrasi Pelayanan Publik*. (www.google.com) (Diakses 22 Maret 2013)
- Andini. 2007. *Budaya Organisasi dan Pengawasan Dari Masyarakat Terhadap Penerapan Good Governance*. Skripsi. UNP.
- Arikunto, Suhardi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Reineka Cipta.
- Arens, Alvin.A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2008. "Auditing and Assurance Services." Twelfth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc. Diterjemahkan Oleh Herman Wibowo. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.
- Bappenas. 2002. *Memahami Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta
- Dedi Noedirwan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dharma Setyaawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambanan.
- Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Falah. 2005. *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal*. Yogyakarta: LPKN
- Handi Pratama. 2006. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan Good Governance*. UBH. Padang
- Harian Singgalang. 2013. *Laporan Keuangan Pemko Bukittinggi*. Padang: Singgalang
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Deponegoro
- Indra Bastian. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Pablik*. Jakarta: Salemba Empat.
- *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Josef Riwu Kaho. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kiki Wardani. 2008. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance*. Skripsi.UNP.
- Krina. 2006. *Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menciptakan Mekanisme Good Governance*. Jurnal. Semarang. STIE Stikubank.
- Kurnia Wahyudi. 2009. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Peran Auditor Intern dan Pengawasan Dari Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Pablik*. Yogyakarta : Andi
- .2002. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mohammad Mahsun. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Munandar. 2001. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Polidano dalam Wiranto. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rivai Veithzal. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen. 2001. *Prilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallindo, Jakarta.

- Rudi Idriansyah. 2009. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan *Value for Money* Terhadap *Good Governance* Pada Organisasi Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat. *Skripsi*. Padang. FE UNP.
- Sawyer's, Lawrence B, Mortimer A. Dittenhofer, & James H. Scheimer. 2003. "Sawyer's Internal Auditing." Fifth Edition. Diterjemahkan Oleh Desi Adhariani. 2005. *Audit Internal Sawyer*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restruksi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono, 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2007. *Akuntansi Pemerintahan daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tatag Wiranto . 2002. *Akuntabilitas dan Tranportasi pelayanan Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Umar Husein. 2008. *Desain Penelitian akuntansi Keprilakuan*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Widya Sari. 2009. *Pengaruh akuntabilitas dan Tranparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah*. *Skripsi*. Padang. FE UNP..

Lampiran 1

KUESIONER

1. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Nama SKPD :

Kuisisioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/Ibu tempuh:
 - a. S2
 - b. S1
 - c. D3
 - d. D1
 - e. SLTA
2. Bidang Keahlian (Pendidikan) Bapak/Ibu yang telah ditempuh:
 - a. Akuntansi
 - b. Manajemen
 - c. Teknik
 - d. Hukum
 - e. Ilmu Lainnya (.....)
3. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja di SKPD ini:
 - a. >5 Tahun
 - b. 4 Tahun
 - c. 3 Tahun
 - d. 2 Tahun
 - e. <2 Tahun

2. Pernyataan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju **TS = Tidak Setuju**
S = Setuju **STS = Sangat Tidak Setuju**
RR = Ragu-Ragu

A. Penerapan Good Governance (GG)

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
2	Adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
3	Kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
4	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan dan transparansi pemerintah					
5	Penyelenggara pemerintahan yang mempunyai daya tanggap akan menciptakan tata pemerintah yang baik.					

6	Pemerintah daerah tidak akan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.					
7	Tidak adanya keterbukaan pemerintahan, akan menciptakan tata pemerintahan yang baik.					
8	Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.					
9	Pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif tidak akan menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
10	Diterapkannya tata pemerintahan yang baik akan meningkatkan efisien dan efektifitas.					
11	Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).					
12	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak harus memiliki visi yang jauh kedepan.					
13	Kegiatan operasional yang efisien apabila suatu hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya.					

B. Peran Badan Pengawas Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.					
2	Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan secara berkala.					
3	Inspektorat daerah melakukan pengujian terhadap laporan dari unit atau satuan kerja secara berkala.					
4	Inspektorat daerah melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.					
5	Inspektorat daerah melakukan penilaian atas manfaat keberhasilan pelaksanaan suatu program.					
6	Inspektorat daerah mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah					

C. Budaya Organisasi Daerah

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Aparat tidak dikelompokkan menurut bidang kerja atau bidang profesi.					

2	Aktivitas kerja sama aparat lebih diutamakan daripada kerja individual.					
3	Keputusan yang diambil manajemen sangat mempengaruhi kinerja aparat.					
4	Aparat dituntun untuk bekerjasama dengan aparat lainnya.					
5	Terdapat peraturan dan pengawasan langsung dalam mengawasi kinerja aparat.					
6	Aparat berani mengabil resiko dalam bertindak.					
7	Aparat yang memiliki kinerja baik diberikan <i>reward</i> diluar faktor lain yang bukan kinerja.					
8	Adanya sikap terbuka aparat terhadap kritikan.					
9	Dalam mengembangkan hasil kinerja manajemen lebih menekankan pada hasil dibanding proses yang digunakan.					
10	Terdapat pengawasan organisasi dalam mengubah lingkungan eksternal.					

LAMPIRAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

UJI VALID Y (*Good Governance*)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	98.0
	Excluded ^a	1	2.0
	Total	51	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.793	.810	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00002	38.6200	9.057	.599	.554	.761
VAR00003	38.7600	9.615	.356	.268	.787
VAR00004	38.8000	9.510	.441	.316	.778
VAR00005	38.9000	9.520	.479	.461	.775
VAR00006	38.7000	9.235	.525	.362	.769
VAR00007	38.8800	9.455	.331	.470	.792
VAR00008	39.2000	8.571	.443	.578	.783
VAR00009	39.0400	8.325	.496	.415	.774
VAR00010	38.9600	9.509	.529	.564	.771
VAR00011	38.9400	9.200	.634	.703	.760

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
43.2000	11.102	3.33197	10

UJI VALID (Inspektorat Daerah) X₁

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.672	.695	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	20.6800	3.732	.574	.461	.568
VAR00002	19.7400	6.115	.389	.494	.640
VAR00003	19.8200	6.069	.490	.553	.622
VAR00004	20.0600	5.894	.368	.204	.642
VAR00005	20.1400	5.307	.419	.406	.624
VAR00006	20.2600	5.870	.300	.173	.663

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24.1400	7.429	2.72562	6

UJI VALID (Budaya Organisasi) X₂

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.751	.783	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	32.0200	9.000	.420	.249	.738
VAR00003	31.3200	10.344	.596	.397	.716
VAR00004	31.3800	10.281	.415	.355	.731

VAR00005	31.2200	10.093	.665	.498	.707
VAR00006	31.6200	10.036	.527	.366	.716
VAR00007	31.6600	9.739	.374	.382	.740
VAR00008	31.4800	9.479	.506	.414	.715
VAR00009	31.6200	10.363	.334	.285	.743
VAR00010	31.6800	10.222	.300	.242	.752

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35.5000	12.214	3.49489	9

Uji Asumsi Klasik

1. STATISTIK DESKRIPSI

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	50	14.00	36.00	50.00	43.2000	3.33197
X1	50	12.00	18.00	30.00	24.1400	2.72562
X2	50	15.00	30.00	45.00	35.5000	3.49489
Valid N (listwise)	50					

A. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.69176170
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.622
Asymp. Sig. (2-tailed)		.834
a. Test distribution is Normal.		

B. MULTIKOLONIERITAS

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

		Tolerance	VIF
1	X1	.893	1.120
	X2	.893	1.120

a. Dependent Variable: Y

C. HETEROKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.920	2.566		-.748	.458
	X1	.018	.085	.031	.210	.835
	X2	.104	.066	.235	1.568	.124

a. Dependent Variable: AbsUt

UJI MODEL DAN UJI T

D. PENGUJIAN MODEL PENELITIAN

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188.967	2	94.483	12.508	.000 ^a
	Residual	355.033	47	7.554		
	Total	544.000	49			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.347	.320	2.74844

a. Predictors: (Constant), X2, X1

E. PENGUJIAN HIPOTESIS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.340	4.621		5.268	.000
X1	-.067	.152	-.055	-.439	.663
X2	.577	.119	.605	4.852	.000

a. Dependent Variable: Y